

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia memiliki kawasan pesisir yang begitu luas dan berada di urutan keempat di dunia dengan garis pantai terpanjang diperkirakan 95.000 km dengan jumlah pulau sekitar 17.504 buah. (Robert Siburian dan John Haba, 2014). Wilayah ini merupakan tempat menumpuknya berbagai bahan buangan, baik berasal dari hulu maupun daerah setempat, akibat berbagai macam aktivitas manusia. Ada lima ciri khas wilayah pesisir : Wilayah yang mempunyai daya dukung yang sangat tinggi dan merupakan tempat terkonsentrasinya berbagai kegiatan manusia. Oleh sebab itu, bukanlah secara kebetulan apabila banyak kota besar berada di wilayah pesisir, secara geografis, wilayah pesisir pada umumnya didiami penduduk dengan beragam latar belakang mata pencaharian sehingga rentan terhadap kerusakan lingkungan, pengeksploitasian wilayah pesisir dengan cara monokultur (*single use*) ditinjau dari sisi ekonomi maupun ekologi akan berdampak pada kerusakan lingkungan, pada era globalisasi dan informasi dewasa ini, wilayah pesisir merupakan domain penting sebagai pintu gerbang informasi dan pusat kegiatan ekonomi, perdagangan dan jasa, lalu lintas barang dan transportasi missal, dan dari perspektif masyarakat lokal, wilayah pesisir masih diperlukan sebagai properti milik bersama dan menjadi kancah perebutan wilayah usaha dan sumber konflik antar pemangku kepentingan (Nugroho dan Dahuri, 2004).

Pertemuan wilayah darat dan laut pada wilayah pesisir biasanya ditandai dengan adanya vegetasi mangrove. Hutan mangrove memiliki kekayaan alam

diantaranya flora, fauna yang menempati kawasan mangrove sebagai sumber kehidupan mereka dan sumber daya yang tersedia. Ekosistem hutan mangrove juga berperan terhadap perekonomian pantai secara tidak langsung. Indonesia merupakan negara kelautan terbesar yang memiliki hamparan hutan mangrove terluas di dunia. Berdasarkan data Kementerian kehutanan tahun 2007, luas hutan mangrove di Indonesia adalah 7.758.410,595 ha (Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan, 2009 dalam Hartini *et al.*, 2010) dan menurut data yang dikeluarkan oleh *FAO* pada tahun 2007, mangrove di Indonesia sendiri mengalami penyusutan pada jenjang tahun 1980-1990 sebesar 70.000 ha mangrove, pada jenjang 1990-2000 mengalami penyusutan sebanyak 35.000 ha mangrove dan 2000-2005 mengalami penyusutan sebanyak 50.000 ha mangrove. Kota Probolinggo sendiri merupakan kota yang notabene berada pada kawasan pesisir utara pulau Jawa yang memiliki kawasan hutan mangrove. Berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo (2010) dan Dinas Pertanian (2011), apabila dilihat luas hutan mangrove dari tahun 2010 dan 2011, luas hutan mangrove di Kota Probolinggo mengalami penurunan dari angka 146,3 Ha pada tahun 2010 menjadi 125,5 Ha pada tahun 2011. Hal ini terjadi akibat pengelolaan hutan mangrove yang kurang memiliki standart lingkungan yakni adanya tambak ikan maupun udang dan mangrove yang berada dalam satu ruang lingkup kawasan, disamping itu kegiatan masyarakat lokal yang kurang mengetahui pengetahuan tentang mangrove. Jika, hal ini terus terjadi maka, ditakutkan kawasan hutan mangrove di Kota Probolinggo akan terus berkurang tiap tahunnya. Dengan melihat hal tersebut masyarakat lokal merupakan variabel penentu dari kelestarian hutan

mangrove tersebut, pengelolaan ekowisata yang berbasis masyarakat (*community based ecotourism*) merupakan pilihan yang tidak bisa di elakkan dalam membangun ekowisata hutan mangrove di Kota Probolinggo.

Ekowisata berbasis masyarakat merupakan ekowisata yang menitik beratkan peran aktif komunitas lokal. Hal tersebut di dasarkan kepada kenyataan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang alam, sejarah serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata, sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak bahkan partisipasi masyarakat di artikan secara lebih luas yaitu harus dilibatkan dalam taraf perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan (Mubyarto & Sartono, 1988). Melalui ekowisata mangrove yang berbasis masyarakat diharapkan ekosistem kelestarian hutan mangrove dapat terus terjaga dan menyadarkan masyarakat lokal untuk selalu terus menjaga keberadaan hutan mangrove yang menunjang perekonomian maupun keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal tersebut. Maka dari itu, indentifikasi potensi kawasan mangrove serta penataan kawasan perlu dikaji lebih lanjut guna mendukung pengembangan kawasan wisata pesisir pantai Kota Probolinggo sehingga perlu diperhatikan aspek sosial ekonomi, aspek budaya dan lingkungan sangat diperlukan untuk keuntungan semua pihak baik wisatawan, pemerintah maupun masyarakat. Penataan kawasan wisata didasari dengan keberadaan kawasan ruang tumbuh dan keanekaragaman jenis mangrove serta potensi sumberdaya alam lainnya yang mendukung dijadikannya kawasan ekowisata mangrove yang berbasis masyarakat

## **B. Perumusun Masalah**

Ditinjau dari Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo No. 13 Tahun 2012 tentang Penataan Kawasan Pantai BAB II pasal 3 menyebutkan :

- a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pantai serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pantai agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan.
- c. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pantai.

Dari PERDA diatas dapat disimpulkan peran pemerintah maupun terkhusus masyarakat sangatlah penting dengan adanya keselarasan atau kerjasama antar pemerintah dan masyarakat guna menciptakan daya tumbuh maupun kelestarian hutan mangrove yang ada di Kota Probolinggo. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji adanya potensi yang ada, baik flora dan fauna guna mengembangkan kawasan ekowisata hutan mangrove yang berbasis masyarakat untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Adapun permasalahan yang perlu dikaji yaitu :

1. Bagaimana potensi ekosistem dan kondisi biofisik mangrove sebagai kawasan wisata di pesisir pantai Desa Mayangan dan desa Pilang ?
2. Bagaimana konsep penataan kawasan ekowisata daerah pesisir pantai Desa Mayangan dan Desa Pilang berdasarkan potensi yang ada dengan berbasis masyarakat

### **C. Tujuan**

1. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan kawasan mangrove di Kawasan Utara Kota Probolinggo
2. Membuat Konsep Penataan Kawasan Mangrove sebagai ekowisata yang berbasis masyarakat guna kelestarian hutan mangrove di Kota Probolinggo

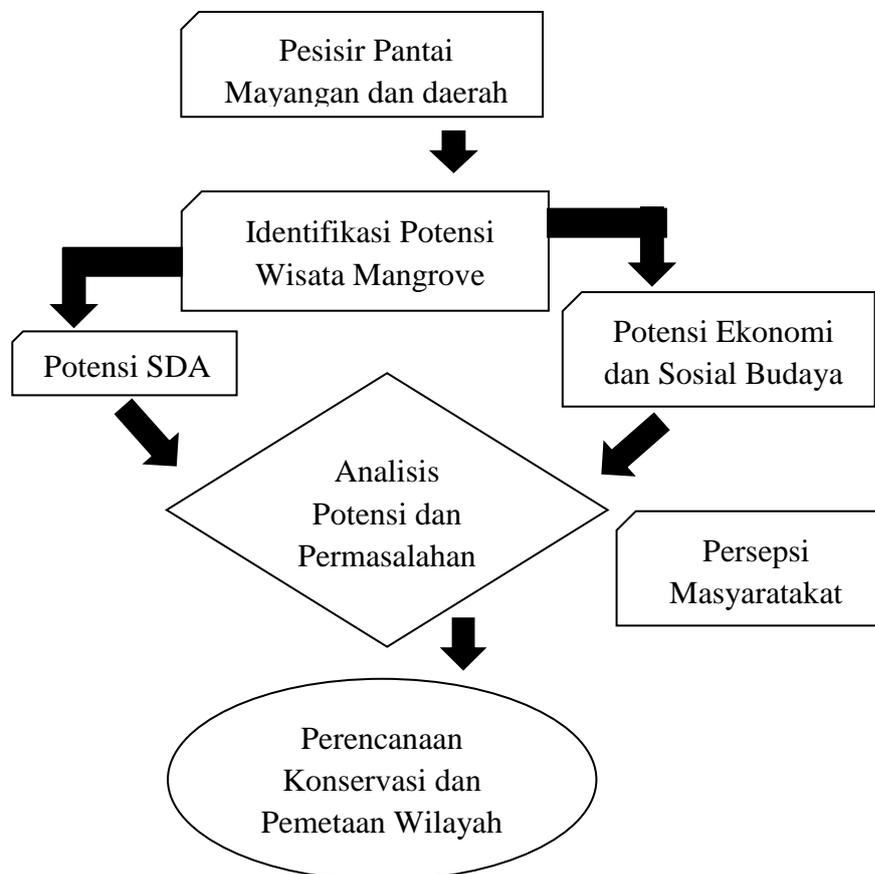
### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengembangan kawasan ekowisata mangrove dan menjadi bahan pertimbangan dalam peraturan kebijakan kawasan mangrove di Pantai Probolinggo, Kota Probolinggo.

### **E. Batasan Studi**

Penelitian ini hanya difokuskan pada daerah nelayan dan kawasan perkampungan kawasan mangrove, Kota Probolinggo, Jawa Timur di Kecamatan Mayangan / Desa Mayangan dan Kecamatan Kademangan / Desa Pilang.

## F. Kerangka Pikir



Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian

Penurunan luas hutan mangrove, selain disebabkan oleh aktivitas pembangunan seperti banyaknya industri dan pemukiman yang dibangun di daerah pesisir, tentunya kerusakan hutan mangrove yang terjadi tidak terlepas dari aktivitas masyarakat pesisir kota Probolinggo. Beberapa tempat yang mengalami dampak tersebut yakni desa Mayangan dan desa Pilang yang notabene penduduknya sebagai nelayan dan industri tambak. Selain itu dengan rusaknya hutan mangrove diprediksikan akan terjadi ancaman bencana seperti abrasi yang semakin luas, kenaikan muka air laut, dan pencemaran

kawasan itu sendiri. Dilihat dari segi sosial, dengan rusaknya hutan mangrove mengakibatkan terjadinya potensi perikanan dan rusaknya kawasan pertanian akibat tersebut, menurunnya tingkat ekonomi masyarakat yang mengandalkan perutnya dari sektor tersebut. Selain itu, berubahnya pola sosial masyarakat di lingkungan kawasan mangrove tersebut. Pentingnya mangrove bagi kehidupan masyarakat pesisir diperlukan adanya penanaman mangrove kembali dengan penzonasian atau perencanaan yang sesuai dengan mempertimbangkan aspek budidaya dan konservasi.

Secara geografis, Wilayah Kota Probolinggo di sebelah utara berbatasan langsung dengan laut yaitu Selat Madura, oleh karenanya sebagian penduduknya beraktifitas dan berdomisili di dekat pantai atau di kawasan pesisir. Panjang pantai wilayah Kota Probolinggo adalah sekitar  $\pm 7$  Km dengan berbagai aktivitas masyarakat di dalamnya. Secara umum masyarakat di kawasan pesisir Kota Probolinggo, mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan penangkap ikan, pembudidaya ikan di tambak, serta pengolah ikan. Derap langkah kehidupan masyarakat pesisir Kota Probolinggo pada kurun waktu akhir-akhir ini semakin berkembang. Perkembangan tersebut bukan tanpa alasan seiring berkembangnya kegiatan perekonomian dan pembangunan di wilayah tersebut. Namun demikian bukan berarti perkembangan tersebut sama sekali tidak menimbulkan dampak, baik yang negatif maupun yang positif. Kita akan tersenyum terhadap ekses yang positif, namun kita perlu khawatir terhadap dampak negatif yang kelak ditimbulkan. Strategisnya wilayah pesisir dan laut bagi perputaran roda perekonomian serta ditunjang oleh tingginya keanekaragaman hayati, menjadikan daerah ini merupakan tempat segala macam kegiatan manusia. Pemukiman, pabrik berbagai

macam jenis, pelabuhan, supermarket, jalan raya tumpah ruah di area pesisir. Tidak hanya di darat, di laut kita jumpai pula berbagai aktivitas, seperti perikanan, pengeboran minyak dan gas bumi, pelayaran baik untuk olah raga, rekreasi maupun untuk niaga. Berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo (2010) dan Dinas Pertanian (2011). Apabila dilihat luas hutan mangrove dari tahun 2010 dan 2011, luas hutan mangrove di Kota Probolinggo mengalami penurunan dari angka 146,3 Ha pada tahun 2010 menjadi 125,5 Ha pada tahun 2011.